

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan gambaran dari berbagai individu, masyarakat adalah kekuatan bagi individu untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Karena seorang individu tidak akan mampu untuk hidup sendiri, dan akan selalu membutuhkan pihak lainnya. Berdasarkan status ekonominya, masyarakat terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu masyarakat miskin (menengah kebawah) dan masyarakat kaya (menengah keatas). Banyak konflik atau permasalahan yang terjadi karena sebuah kemiskinan. Muncul tak hanya secara kasat mata saja, namun merambah pada media masa, banyak berita kemiskinan yang media beritakan, tentang parahnya kemiskinan, merambahnya kemiskinan dan bahkan kemiskinan yang sulit di tanggulasi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) data kemiskinan Per Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta bertambah 6.900 orang dibandingkan dengan September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang sedangkan data kemiskinan menurut data warga miskin kelurahan Pungkur pada tahun 2015 berjumlah 1.581 jiwa dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 2.026 jiwa. Dengan begitu banyaknya fenomena kemiskinan menjadi faktor penting bagi pemerintah untuk dapat membantu masalah kemiskinan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah

membuat program yang di pandang cocok untuk membantu masalah tersebut, dimana pada tahun 2005 pemerintah membuat program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) yang mempunyai fokus pengentasan kemiskinan di perkotaan berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) pada tahun 2007. Berdasarkan manual PNPM MP (2010, hal i) program ini sangat strategis menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar, kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang serta menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah. Lembaga kepemimpinan masyarakat tersebut bernama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Di dalam program PNPM MP penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yakni infrastuktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh unit-unit pengelola yang terbagi menjadi 3 yaitu Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Menurut Pedoman Operasional Baku Keuangan Mikro Syariah (KMS) (2014, hal 2) di dalam kegiatan ekonomi diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir (PDB), yakni perguliran pinjaman skala mikro kepada masyarakat miskin sistem yang digunakan adalah sistem keuangan konvensional. Dalam setiap KSM dibutuhkan peran petugas UPK yang dapat membantu KSM-KSM untuk dapat mengajukan pinjaman kepada BKM. Peran petugas UPK sangat penting untuk dapat membantu masyarakat yang belum mengerti bagaimana melakukan prosedur peminjaman untuk dapat

meningkatkan ekonomi masyarakat yang membutuhkan BKM Permadani mulai dibentuk pada tahun 1999. Pada tahun 2000 Kelurahan Pungkur mendapatkan dana pada gelombang pertama yaitu sebesar Rp 234.586.456,00 pengalokasian dana tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu Rp 162.749.836 digunakan untuk dana ekonomi bergulir dan Rp 65.372.728 digunakan untuk prasarana dan lingkungan. Setelah mendapatkan dana tersebut maka BKM Permadani menyerahkan modal pinjaman dana bergulir kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK). Modal pinjaman dana yang diterima pada tahun 2000 dipergunakan untuk KSM-KSM yang membutuhkan tetapi pada saat itu belum ada aturan yang ditetapkan untuk dapat melakukan peminjaman dana bergulir kepada BKM melalui UPK, pihak petugas memberikan pinjaman kepada anggota KSM dapat mencapai 5 juta per orang, 1 KSM mendapat dana pinjaman sebesar 40 juta maka pada saat itu terjadi kemacetan di dalam pengembalian dana tersebut, dana yang awal mulanya sebesar Rp 162.749.836,- menjadi sisa Rp 20.000.000,- karena masyarakat berpikir bahwa dana tersebut yang diberikan oleh pemerintah yang disalurkan melalui UPK adalah dana hibah sehingga terjadi kemacetan. Sejak tahun 2005 maka BKM Permadani melakukan penataan untuk sistem keuangan konvensional yang dijalankan oleh UPK. Persyaratan yang ditetapkan adalah KSM yang ingin meminjam kepada UPK membuat proposal, fotocopy KK dan KTP, alamat tinggal di Kelurahan Pungkur, pinjaman pertama dimulai dari 500.000 per anggota KSM. UPK BKM Permadani lebih selektif untuk memberikan pinjaman dana bergulir karena tidak ingin kejadian pada tahun 2000 terulang kembali. Sampai pada bulan Agustus 2017 dana bergulir

yang dimiliki oleh UPK sebesar Rp 332.633.082,50. Pada tahun 2008 petugas UPK yang bertugas berjumlah 3 orang dan KSM yang dibina sejak tahun 2009 sampai 2017 berjumlah 55 KSM setiap KSM mempunyai anggota yang berbeda-beda minimal 5-7 orang anggota KSM dan maksimal 10-15 orang anggota KSM. Total anggota yang mendapatkan pinjaman dana bergulir sampai September 2017 adalah 275 orang. Dengan adanya bantuan modal yang dipinjamkan oleh BKM maka setiap anggota KSM Kelurahan Pungkur dapat terbantu bukan hanya didalam segi ekonomi tetapi juga segi sosial. Dalam segi ekonomi BKM berharap untuk dapat membantu ekonomi lemah masyarakat Kelurahan Pungkur dan dalam segi sosial agar dapat mencegah masyarakat untuk meminjam uang kepada rentenir. BKM melalui UPK membantu anggota-anggota KSM untuk dapat meningkatkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap anggota agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pungkur. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Pendampingan Unit Pengelola Keuangan Terhadap Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Studi Kasus pada Badan Keswadayaan Masyarakat Permadani di Kelurahan Pungkur Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran pendampingan Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Permadani
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Badan Keswadayaan Masyarakat Permadani
3. Bagaimana Peran pendampingan Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Permadani terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Pungkur Kota Bandung

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pendampingan Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Permadani
2. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Badan Keswadayaan Masyarakat Permadani
3. Untuk mengetahui peran pendampingan Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Permadani terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Pungkur Kota Bandung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis maupun praktik dilapangan, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Hasil penelitian dapat memberikan informasi untuk mengembangkan Ilmu Kesejahteraan Sosial terutama tentang pemberdayaan masyarakat melalui organisasi lokal dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Pemerintah Kota Bandung dan pemerintah setempat wilayah kecamatan Pungkur hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran serta masukan terhadap pelaksanaan KSM, khususnya peran pendampingan UPK di Kecamatan Pungkur

b. Untuk pengurus BKM, khususnya petugas UPK, penelitian ini dapat dijadikan masukan, sehingga dapat memperbaiki kekurangannya, khususnya dalam bidang peran pendampingan UPK dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggota KSM.

